



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91201003024540002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PRAKARSA SAMUDERA INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | 9120100302454 |
| Alamat Kantor | : |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 52240 - Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Hassanudin, Pelabuhan CPO, Kabil, Desa/Kelurahan Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29467 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 22 Agustus 2025

**a.n. Gubernur Kepulauan Riau
Kepala DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91201003024540002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; - Memiliki sistem manajemen mutu; Peralatan: Forklift; Pallet, Ship side-net; Rope sling; Rope net; dan Wire net. Dengan jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan bongkar muat pelabuhan setempat. - Memiliki tenaga ahli, dengan syarat minimal: Pelabuhan Utama: ANT II dan/atau D.III Pelayaran/Transpotrasi Laut Pelabuhan Pengumpul: ANT III dan/atau D.III Pelayaran/Transpotrasi Laut; Pelabuhan Pengumpan: ANT IV dan/atau SMA/SMK atau Sederajat yang memiliki sertifikat ketrampilan; Dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang bongkar muat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat. - Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha bongkar muat berdasarkan jumlah perusahaan bongkar muat dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat. Kewajiban: - Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha bongkar muat barang; - Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan surat penunjukan pelaksana bongkar muat kepada penyelenggara pelabuhan setempat; - Menyampaikan laporan kegiatan bongkar muat barang setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat; - Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha bongkar muat barang; - Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; - Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing dan stripping bagi kepentingannya sendiri;	Telah terverifikasi	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG SERTIFIKAT STANDAR : 91201003024540002

- Nama Pelaku Usaha : PT. Prakarsa Samudera Indonesia
 - Bidang Usaha : Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
 - Wilayah Operasional : Wilayah Kerja KSOP Khusus Batam
-
- Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Surat Izin Operasional Perusahaan Bongkar Muat Barang ini dapat DIBEKUKAN sewaktu-waktu
 - Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan Otoritas Pelabuhan Setempat
 - Menyampaikan Laporan internal audit dan pemutakhiran dokumen persyaratan setiap 2 (dua) tahunan kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan Otoritas Transportasi Setempat

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PERHUBUNGAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah
(Gedung B1 Lt. I & II) Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124

Pos-el : dishub@kepriprov.go.id Laman : <https://dishub.kepriprov.go.id>

Tanjungpinang, 20 Agustus 2025

Nomor : B-500.11.1/731/DISHUB/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Izin Perusahaan
Bongkar Muat PT. Prakarsa Samudera Indonesia

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau

di
Tempat

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi dan sesuai hasil verifikasi terhadap permohonan izin PT. Prakarsa Samudera Indonesia melalui Sistem OSS RBA dapat direkomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat Standar Izin Usaha Sektor Perhubungan pada Sistem OSS RBA, dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : PT. Prakarsa Samudera Indonesia
2. NIB : 9120100302454
3. Kode KBLI : 52240 - Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
4. Alamat Perusahaan : Jalan Hassanudin Pelabuhan CPO Kabil Desa Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Demikian Surat Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Riau,



Junaidi, S.E., M.H
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 196907191997031001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERHUBUNGAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah
(Gedung B1 Lt. I & II) Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dishub@kepriprov.go.id Laman : https://dishub.kepriprov.go.id

BERITA ACARA EVALUASI PERMOHONAN IZIN BERUSAHA

Nomor : 019/BAE-BUAP/HUB/VIII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh lima, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan evaluasi permohonan izin berusaha pada Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) Kode KBLI 52240 – Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) pada Badan Usaha atas nama PT. Prakarsa Samudera Indonesia dengan hasil sebagai berikut :

I. Data Umum

- 1. Nama Perusahaan : PT. Prakarsa Samudera Indonesia
- 2. Lokasi Usaha : Jalan Hassanudin Pelabuhan CPO Kabil Desa Kabil
Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
- 3. Penanggungjawab : Bambang Eratman Syahputra
- 4. Izin yang dimohon : Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
- 5. Kode KBLI : 52240

II. Dokumen Persyaratan

No	Persyaratan	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak	
1.	Akta Perusahaan	✓	-	Akta Notaris PT. Prakarsa Samudera Indonesia nomor 10 tanggal 5 November 2019
2.	SK Kemenkumham Perusahaan	✓	-	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PT. Prakarsa Samudera Indonesia nomor AHU-0014351AH.01.02
3.	NPWP Perusahaan	✓	-	NPWP a.n PT. Prakarsa Samudera Indonesia nomor
4.	KTP Direktur Perusahaan	✓	-	KTP a.n Bambang Eratman Syahputra
5.	Struktur Organisasi Perusahaan	✓	-	Susunan Organisasi Kerja PT. Prakarsa Samudera Indonesia
6.	BPJS Ketenagakerjaan	✓	-	BPJS no. 19000000837227
7.	Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet	✓	-	Surat Keterangan Nomor 059/SKL/C6-SN/I/2022
8.	Surat rekomendasi dari	✓	-	Surat Rekomendasi KSOP

	penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha bongkar muat			Khusus Batam nomor UM.209/5/7/KSOP.Btm/2025 tanggal 26 Mei 2025
9.	Sertifikat Tenaga Ahli Perusahaan ANT II/ ANT III/ ANT IV dan/ atau D.III Pelayaran/ Transpotrasi Laut	✓	-	Tenaga ahli a.n Feldy Rizal Hadju
10.	Memiliki Peralatan Bongkar Muat Perusahaan dengan jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan Bongkar Muat Barang pelabuhan setempat	✓	-	Surat Sewa Menyewa Peralatan Bongkar Muat
11.	Sertifikat Laik Operasi (SLO) listrik tempat usaha	✓	-	Surat nomor 566/12346/DTKT-4/BTM-K3 ILP02/2025
12.	Sistem Keselamatan dan Keamanan tempat usaha	✓	-	APAR, Alarm, CCTV, Penanda Jalur Evakuasi, Penanda Exit, Penanda Titik Kumpul dan Kotak P3K tersedia

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen administrasi, dokumen teknis dan kunjungan lapangan untuk permohonan izin berusaha pada sistem OSS-RBA atas nama Badan Usaha PT. Prakarsa Samudera Indonesia dengan kode KBLI 52240 – Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi yang telah dilakukan pada data dan dokumen Permohonan Izin Berusaha PT. Prakarsa Samudera Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
2. Berdasarkan evaluasi tersebut diatas, maka bersama ini Kami memberikan usul agar dapat diterbitkan rekomendasi persetujuan penerbitan sertifikat standar pada Sistem Online Single Submission (OSS-RBA) atas nama PT. Prakarsa Samudera Indonesia dengan kode KBLI 52240 – Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Seksi Badan Usaha

Harliansyah Panjaitan, S.E
NIP.

Analisis Angkutan Laut,

Andi Majidek, S.Si
NIP.

DOKUMENTASI EVALUASI PERMOHONAN IZIN BERUSAHA

